

307. f2
HUG

P C1



LAPORAN PENELITIAN

PROFIL POTENSI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) DI KABUPATEN JEPARA

OLEH :
SATRIO NUGROHO
HADI SASANA

Dibiayai Proyek Peningkatan dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan Dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian tanggal 15 Maret 2001 Nomor :
016/LIT/BPPK-SDM/III/2001
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
2001

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Profil Potensi Kelompok Usaha Bersama (KUB)
di Kabupaten Jepara
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Satrio Nugroho, MSi
 - b. Jenis Kelamin : Laki - laki
 - c. Golongan / Pangkat : III b / Penata Muda
 - d. NIP : 131 773 816
 - d. Jabatan Fungsional : Asisiten Ahli
 - e. Fakultas / Jurusan : Teknik / Arsitektur
 - f. Universitas : Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi
3. Anggota Peneliti : 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Jepara
5. Jangka Waktu Penelitian : 9 (Sembilan) bulan
6. Jumlah Biaya : 5.000.000 (lima juta rupiah)
7. Dibiayai Oleh : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Th. 2001

Semarang, 29 September 2001

Mengetahui
Kapuslit Kependudukan Lemlit UNDIP

Ketua Peneliti

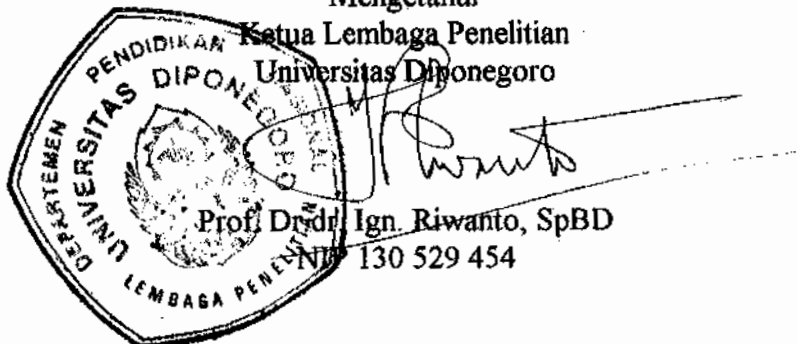


Dra. Herniwati RH, MS
NIP 130 937 139



Ir. Satrio Nugroho, MSi
NIP 131 773 816

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ign. Riwanto, SpBD
NIP 130 529 454

SUMMARY

The open policy and economic globalization required national economy as one solid unity of economy. Furthermore it needed a harmony in the relation among institution that play the role under the same function each benefits to one another.

This research is run to measure the right model of partnership between KUB and its partner and to analyze which internal factors needed by the KUB regarding the partnership relation. The research was held at Jepara Regency in Central Java, which taken samples in Mlonggo. The analyzing method used is SWOT.

Result of the research shows that partnership has become a general way of doing business but yet not to the term of optimality. Among many difficulties found are: that large and middle industries are taking-advantage oriented of the relation up to maximum rate possible, thus the partnership is seen as more burden towards company responsibilities rather than benefit. In the other side, the professional competency among the KUB subject are generally insufficient. Other difficulty is that the principles of both benefiting and equality partnership is far from practiced optimally. The scheme of partnership recommended between the KUB and its partner is a sub-contract and general trading scheme under a simple and integrated model. Sub-contract partnership model is designed for production KUB which produces half finished goods, while the general trading partnership is aimed for production KUB which produces finished goods.

RINGKASAN

Menghadapi situasi keterbukaan dan globalisasi ekonomi diperlukan perekonomian nasional sebagai satu kesatuan ekonomi yang solid. Untuk itu diperlukan tata hubungan/kemitraan usaha yang serasi dan saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian yang tangguh.

Penelitian ini ingin mengetahui model kemitraan usaha yang perlu diterapkan antara Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan mitra usahanya serta faktor-faktor internal apa saja yang diperlukan oleh KUB dalam mengadakan kemitraan usaha dengan para mitranya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jepara, dengan mengambil sampel dua KUB di Kecamatan Mlonggo. Metode analisa yang dipergunakan adalah analisa SWOT.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kemitraan usaha telah dijalankan oleh KUB dengan mitra usahanya tetapi belum optimal, beberapa kendala yang ditemui antara lain : pengusaha/industri besar dan menengah selalu berorientasi untuk mencari keuntungan maksimum sehingga pelaksanaan kemitraan dengan KUB dikawatirkan akan membebani operasional perusahaannya. Dari sisi KUB sendiri pada umumnya tingkat profesionalisme dalam berbisnis masih rendah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmah dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga penulisan laporan.

Harapan kami, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menjadi bahan masukan bagi seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Kami berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak - pihak yang memerlukannya.

Semarang, September 2001

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB : I PENDAHULUAN	1
BAB : II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB : III TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	9
BAB : IV METODOLOGI PENELITIAN	10
BAB : V HASIL DAN PEMBAHASAN	15
BAB : VI KESIMPULAN DAN SARAN	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : 5.1 Keadaan dan Prospek Pemasaran KUB Sampel	17
Tabel : 5.2 Potensi Kewirausahaan Pengurus KUB Sampel	18
Tabel : 5.3 Potensi Bahan Baku	19
Tabel : 5.4 Potensi Pertumbuhan KUB Sampel	20
Tabel : 5.5 Potensi Manajerial dari Sisi Keuangan Pada KUB Sampel	22
Tabel : 5.6 Potensi Manajerial dari Aspek Ketenagakerjaan KUB Sampel	24
Tabel : 5.7 Potensi Manajerial dari Aspek Organisasi dan administrasi Pada KUB Sampel	25
Tabel : 5.8 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan KUB Sampel	27
Tabel : 5.9 Kondisi Sosial Ekonomi di Propinsi Sampel	28
Tabel : 5.10 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Terhadap Pengembangan KUB Menurut Persepsi Pengur.....	28
Tabel : 5.11 Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam Pengembangan KUB Sampel	29
Tabel : 5.12 Kendala dan Peluang Kemitraan Antara KUB Dengan Pengusaha Besar dan Menengah	35
Tabel : 5.13 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala Pengembangan KUB	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 maupun GBHN 1993 telah menunjuk adanya tiga pelaku dalam perekonomian di Indonesia yaitu badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, dan badan usaha milik swasta (BUMS). Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa koperasi adalah bangun perusahaan yang sesuai dengan perekonomian kita yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Disebutkan pula bahwa cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan pembangunan selama enam Pelita lalu telah berhasil mengubah struktur perekonomian Indonesia. Apabila pada awal Pelita pertama struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian, maka pada akhir Pelita kelima yang lalu keadaannya telah berubah sama sama sekali. Sektor industri yang selama ini belum merupakan sektor andalan, sekarang telah menjadi sektor yang paling dominan dalam peranannya terhadap produk domestik bruto kita, sementara sektor pertanian sebagai penopang perkembangan sektor industri.

Menghadapi situasi keterbukaan dan globalisasi ekonomi diperlukan perekonomian nasional sebagai kesatuan ekonomi yang solid, untuk itu perlu didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui koperasi dan usaha kecil serta menengah diharapkan tumbuh dan tersalur kesadaran serta kemampuan ekonomi rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembekalan pengetahuan yang dapat meningkatkan ketrampilan maupun wawasan sumber daya manusia kita sebagai pelaku ekonomi sehingga dapat mengembangkan produksi maupun usaha. Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan salah satu alternatif wadah bagi para pengusaha kecil untuk

mulai berperan sebagai pelaku ekonomi yang terorganisasi, yang dijiwai semangat kebersamaan.

Kelompok usaha bersama, ialah kelompok usaha bersama para pengusaha kecil di pedesaan, yang terdiri dari 20 - 30 anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan peningkatan peranan para pengusaha kecil dalam pembangunan. Dalam kelompok ini kedudukan anggota, adalah sama dan tidak tergantung dari jumlah modal yang disimpan. Sedangkan modal dapat diperoleh dari iuran anggota maupun sumber lain yang sah (Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Industri Kecil, Deperindag 1997).

Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat dikembangkan untuk menjembatani hubungan kemitraan antara kelompok usaha bersama (KUB) sebagai wadah industri/pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar yang dapat saling mendukung dan saling menguntungkan.

Dalam kaitan ini maka di samping perlu dilakukan pembinaan secara konsisten, dan kontinyu yang sesuai dengan kebutuhan, juga diperlukan model/pola kemitraan yang tepat yang dapat memberdayakan KUB melalui pembinaan yang efektif. Upaya pemerintah dalam memayungi terjadinya tata hubungan / kemitraan usaha diantara ketiga pelaku ekonomi telah dilakukan dengan serangkaian kebijakan, antara lain : pelimpahan saham milik BUMS kepada koperasi, Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 yang mewajibkan BUMN menyisihkan 1 - 5 persen dari laba perusahaannya untuk dimanfaatkan bagi pembinaan koperasi dan usaha kecil, ketentuan Pakjan 1990 tentang KUK yang menentukan agar bank umum menyalurkan 20 persen dari total kreditnya pada koperasi dan pengusaha kecil, serta kebijakan - kebijakan lainnya.

Mestinya, hubungan kemitraan didasarkan atas dasar " *Win - Win Solution* " artinya kedua belah pihak yang bekerja sama saling membutuhkan, saling percaya dan saling menguntungkan. Realitanya banyak program kemitraan di lingkungan koperasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor " *Political Will* " dari pemerintah, sehingga hanya terkesan memenuhi target yang dibebankan. Hanya sedikit koperasi maupun KUB yang

mampu mengembangkan kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling melengkapi, saling percaya dan saling menguntungkan.

Dari pola - pola kemitraan nasional yang berjalan selama ini tampaknya tidak semulus yang diharapkan. selama ini ada kesan program kemitraan dilaksanakan setengah hati dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam program kemitraan usaha ini di satu sisi karena faktor internal di tubuh koperasi maupun KUB sendiri yang belum siap bermitra dengan pelaku ekonomi lain, di sisi lain secara eksternal tidak ada kesesuaian dalam pola kemitraan. Dalam pola bapak angkat misalnya PT. Krakatau Steel harus mengurus pengrajin emping mlinjo dan kerajinan tangan, sampai - sampai PT. Krakatau Steel mendirikan unit usaha sendiri untuk menangani pembinaan usaha kecil, ini berarti menambah beban operasional perusahaan.

Penyaluran 1 - 5 persen keuntungan BUMN untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi tidak berjalan lancar. Kendalanya adalah usaha yang dibina umumnya jauh dari *core competency* BUMN. Kendala lainnya kesulitan menyalurkan dana pada pengusaha kecil dan koperasi yang benar - benar membutuhkan karena persoalan yang dihadapi tidak selalu di bidang permodalan. Selanjutnya walaupun data - data di Bank Indonesia menunjukkan ketentuan - ketentuan penyaluran KUK 20 persen sudah dipenuhi, namun ternyata banyak usaha kecil dan koperasi yang tidak tersentuh oleh perbankan. Hal ini di sebabkan banyak bank lebih suka menyalurkan dana KUK mereka kepada bank - bank kecil atau BPR dari pada koperasi atau pengusaha kecil. Padahal BPR menyalurkan sebagian besar pinjamannya untuk kredit konsumsi.

Berbagai model kemitraan yang telah dilaksanakan untuk industri kecil maupun pedagang kecil pada umumnya masih dihadapkan berbagai kendala antara lain seperti kurang siapnya industri kecil maupun pedagang kecil baik dalam bidang manajemen usaha, tehnik produksi serta keterbatasan akses pasar sehingga belum dapat menyelaraskan dengan kebutuhan industri dan pedagang menengah dan besar.

Kendala ini diperkirakan akan lebih kompleks, mengingat jiwa kewirausahaan di dalamnya baru mulai dibentuk serta terbatasnya pendidikan dan modal usahanya. Oleh karena itu diperlukan model kemitraan antara KUB dengan industri besar dan menengah,

yang sesuai dengan kebutuhan Kelompok Usaha Bersama. Pola kemitraan yang didasarkan atas dasar “ *win - win solution* ” ternyata belum berjalan dengan baik. Disisi lain perbaikan kondisi ekonomi masyarakat juga terasa mendesak dilakukan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, pemerintah dan para pelaku ekonomi harus serius menjalankan program kemitraan yang substansial

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan diatas secara umum dapat diketahui bahwa permasalahan utamanya adalah belum optimalnya program kemitraan usaha antara koperasi dengan BUMN maupun MUMS. Secara khusus identifikasi masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah :

1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengembangan KUB.
2. Mengetahui sejauhmana kebijaksanaan pengembangan KUB dan pola kemitraan yang telah dioperasionalkan oleh berbagai instansi/lembaga dan organisasi masyarakat di daerah.
3. Merumuskan bentuk/model kemitraan yang tepat bagi Kelompok Usaha Bersama sub-sektor industri kecil.

Diharapkan hasil dari studi ini dapat dipergunakan untuk menyusun kebijakan dalam pengembangan pola kemitraan KUB dengan industri menengah dan besar, yang dapat lebih memberdayakan KUB. Diharapkan pula model kemitraan ini dapat berperan dalam meningkatkan peranan dan kualitas wanita sebagai sumberdaya pembangunan.